

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Lokasi dan Objek Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di MAN 2 Kudus. Adapun yang menjadi fokus dan objek penelitian ini adalah terkait persepsi guru pada konsep dan implementasi kebijakan Merdeka Belajar pada rumpun mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di MAN 2 Kudus. Untuk memberi gambaran singkat tentang lokasi penelitian, berikut dideskripsikan hal-hal relevan yaitu:

1. Kelembagaan

MAN 2 Kudus berlokasi di desa Prambatan Kidul Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus. Madrasah ini merupakan hasil dari alih fungsi PGAN Kudus pada tahun 1992 yang pengelolaannya dibiayai oleh pemerintah atau DIPA dan *syahriyah* dari swadaya orang tua siswa. Diawali dengan berdirinya SGAI (Sekolah Guru Agama Islam) pada 1 September 1950 yang dikhususkan bagi kelas putra sebagai *Instelling Besluit* Departemen Agama RI dan berubah menjadi PGAP (Pendidikan Guru Agama Pertama) melalui Keputusan Menteri Agama No. 7 Tahun 1951. Proses penyempurnaan PGAP menjadi PGAN Kudus dilakukan pada 13 Desember 1964 sesuai dengan SK Menteri Agama Nomor 106/1964.

PGAN Kudus mengalami alih fungsi menjadi MAN 2 Kudus pada 1 Juli 1992. Setelah beralih fungsi sebagai MAN 2 Kudus, tujuan dari madrasah ini menjadi lebih luas yaitu meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Visi dari MAN 2 Kudus adalah terwujudnya peserta didik yang berakhlak Islami, unggul dalam prestasi dan terampil dalam teknologi. Sedangkan beberapa misi yang dimiliki oleh MAN 2 Kudus yaitu: (1) Menumbuhkan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari serta membiasakan perilaku mulia; (2) Mewujudkan madrasah yang unggul berbasis riset, mendunia, barokah, dan hebat serta bermartabat; (3) Mengembangkan potensi peserta didik yang unggul dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan melalui pembelajaran yang bermakna dan profesional serta inovatif.

Sejak tahun 1992 hingga sekarang, MAN 2 Kudus telah mengalami lima pergantian Kepala Madrasah, mereka adalah

Drs. H. Muklis (1992-1996), Drs. H. Wahyudi (1995-1999), H. Sulaiman Arifin, B.A. (1999-2001), Drs. H. Chamdiq ZU, M.Ag. (2001-2006), Drs. H. Ahmad Rif'an, M.Ag. (2006-2018), dan Drs. H. Shofi, M.Ag. (2018-sekarang).¹

2. Sumber Daya Manusia

a. Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pendidik dan tenaga kependidikan MAN 2 Kudus terdiri dari Kepala Madrasah, Kepala Tata Usaha, pengawas satuan pendidikan, guru, tenaga administrasi, tenaga laboratorium, tenaga perpustakaan, tenaga kebersihan, tenaga keamanan, dan teknisi. Pendidik dan tenaga kependidikan MAN 2 Kudus harus memiliki kompetensi sebagai agen pembelajaran dan kualifikasi akademik (tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi pendidik dan dapat dibuktikan dengan ijazah dan atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai peraturan perundang-undangan), sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pada tahun 2022, pendidik dan tenaga kependidikan MAN 2 Kudus berjumlah 110 orang yang terdiri dari 58 guru PNS, 25 guru non-PNS, 7 tenaga kependidikan PNS, dan 20 tenaga kependidikan non-PNS. Rincian tentang pendidik dan tenaga kependidikan MAN 2 Kudus dapat dilihat pada lampiran.²

b. Peserta Didik

Siswa MAN 2 Kudus dari kelas X, XI, dan XII terdiri jurusan IPA, IPS, Bahasa, dan Keagamaan berjumlah 1219. Mereka berasal dari berbagai kota di Indonesia dan mayoritas berasal dari pulau Jawa. Para siswa MAN 2 Kudus memiliki keunggulan dalam membuat produk inovatif, melakukan penelitian sains dan humaniora, kewirausahaan, kemampuan berbahasa asing, dan kemampuan dalam menghafal Alquran (khusus kelas tahfidz). Dari beberapa keunggulan yang dimiliki oleh para siswa MAN 2 Kudus itulah alasan mereka terkenal dengan berbagai prestasi baik akademik maupun non-akademik di tingkat kabupaten hingga internasional.³

¹ Dikutip dari Rencana Strategis MAN 2 Kudus Tahun 2020-2024.

² Dikutip dari Daftar Pendidik dan Pegawai MAN 2 Kudus Tahun Pelajaran 2021/2022.

³ Dikutip dari Daftar Peserta Didik MAN 2 Kudus Tahun Pelajaran 2021/2022.

3. Fasilitas Pendidikan

Sebagai salah satu madrasah negeri unggulan di Jawa Tengah, MAN 2 Kudus selalu berusaha untuk melengkapi sarana dan prasarana pendidikan. Beberapa sarana yang tersedia di MAN 2 Kudus yaitu LCD di setiap kelas, komputer, *scanner*, laptop, *printer*, dan *meubelair*. Sedangkan prasarananya terbagi menjadi dua yaitu:

- a. Prasarana umum yang berupa air, drainase, sanitasi, taman, listrik, jaringan internet, jaringan telekomunikasi, transportasi dan CCTV.
- b. Prasarana bangunan yang meliputi lahan serta gedung untuk keperluan ruang belajar, ruang pimpinan, ruang kantor, ruang guru, ruang rapat, ruang multimedia, laboratorium, perpustakaan, masjid, fasilitas umum dan kesejahteraan, serta prasarana seni dan olahraga.

Saat ini MAN 2 Kudus telah cukup memiliki sarana dan prasaran yang representatif untuk mendukung jalannya proses pendidikan. Setiap tahunnya MAN 2 Kudus juga tetap berupaya untuk melakukan pengembangan kuantitas dan kualitas sarana dan prasaran agar menjadi Lembaga Pendidikan Islam yang unggul. Rincian tentang sarana dan prasarana MAN 2 Kudus dapat dilihat pada lampiran.⁴

B. Hasil Penelitian

1. Persepsi Guru tentang Konsep Kebijakan Merdeka Belajar

Berdasarkan pada proses wawancara, observasi, dan dokumentasi yang telah dilakukan oleh peneliti pada 24 Desember 2021 hingga 24 Januari 2022 diketahui guru-guru pengampun mata pelajaran Akidah Akhlak di MAN 2 Kudus memiliki persepsi yang hampir sama tentang konsep kebijakan Merdeka Belajar. Hasil penelitian yang telah didapatkan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

a. Konsep Merdeka Belajar

Khusnul Aqibah selaku guru mata pelajaran Akidah Akhlak berpendapat bahwa Merdeka Belajar adalah kebijakan yang memiliki tujuan baik untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indoensia, namun beberapa program Merdeka Belajar dianggap kurang cocok untuk diterapkan di lapangan. Beliau juga berpendapat bahwa kemerdekaan

⁴ Dikutip dari Rencana Strategis MAN 2 Kudus Tahun 2020-2024.

belajar juga diberikan dalam Pendidikan Agama Islam karena tidak ada seseorang yang hebat dan menguasai semua hal kecuali orang yang benar-benar istimewa.⁵

Kedua, Miftakhudin selaku guru mata pelajaran Akidah Akhlak memberikan pendapatnya bahwa Merdeka Belajar merupakan kebijakan pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan guru dan siswa dalam berinovasi pada pembelajaran dengan memberikan mereka kebebasan dan tetap berpedoman pada nilai-nilai Pancasila. Beliau juga berpendapat bahwa Merdeka Belajar dalam Pendidikan Agama Islam itu seperti konsep pendidikan sepanjang hayat (*long life education*) atau pembelajaran yang dimulai dari buaian sampai liang lahat (*minal mahdi ilal lahdi*) karena kehidupan merupakan sebuah proses belajar dimana manusia kan oleh diberi Allah kebebasan untuk memperoleh ilmu berdasarkan kemampuan masing-masing.⁶

b. Penggantian Ujian Nasional (UN) dengan Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) dan Survei Karakter

Khusnul Aqibah selaku guru mata pelajaran Akidah Akhlak juga menyatakan tidak memperlakukan program penggantian UN menjadi AKM dan survei karakter karena pelaksanaan UN sendiri telah menjadi polemik di kalangan para pelaku pendidikan. Beliau mendukung program ini karena beranggapan bahwa keilmuan seseorang tidak akan berarti jika tanpa adanya akhlak yang baik. Namun beliau menyuarakan kepada pemerintah untuk lebih mempersiapkan sebuah program sebelum diterapkan, seperti menyediakan contoh format pengganti UN terlebih dahulu agar dapat menjadi pedoman para pelaksana kebijakan.⁷

Miftakhudin selaku guru mata pelajaran Akidah Akhlak menyatakan persetujuan terhadap adanya AKM dan survei karakter sebagai pengganti UN. Beliau beranggapan dengan adanya AKM atau penyederhanaan asesmen dapat memudahkan guru terutama guru rumpun mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dalam menentukan materi yang benar-benar penting untuk para siswa karena selama ini

⁵ Khusnul Aqibah, wawancara oleh penulis, 12 Januari 2022, wawancara 1, transkrip.

⁶ Miftakhudin, wawancara oleh penulis, 18 Januari, 2022, wawancara 2, transkrip.

⁷ Khusnul Aqibah, wawancara oleh penulis, 12 Januari 2022, wawancara 1, transkrip.

rumpun mata pelajaran Pendidikan Agama Islam diberi porsi sedikit namun materinya terlalu banyak. Penyederhanaan asesmen tersebut juga akan menjadikan materi-materi rumpun mata pelajaran Pendidikan Agama Islam semakin dipahami oleh para siswa.⁸

c. Penggantian Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) dengan Asesmen Mandiri dari Sekolah

Khusnul Aqibah selaku guru mata pelajaran Akidah Akhlak berpendapat bahwa penggantian USBN menjadi asesmen mandiri dari sekolah juga tidak menjadi masalah bagi para guru rumpun mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di MAN 2 Kudus. Beliau berpendapat bahwa sebaiknya pemerintah menyiapkan atau menyediakan pedoman bentuk asesmen baru pengganti USBN sebelum program benar-benar diterapkan di suatu lembaga pendidikan.⁹

Miftakhudin selaku guru mata pelajaran Akidah Akhlak memberikan pendapat bahwa penggantian USBN menjadi asesmen mandiri dari sekolah memang seharusnya dilakukan karena pihak sekolah khususnya para guru adalah pihak yang lebih memahami kemampuan para siswanya. Oleh karena itu asesmen sebaiknya memang dibuat oleh masing-masing guru mata pelajaran agar sesuai dengan tingkat kemampuan para siswa.¹⁰

d. Penyederhanaan Format Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

Khusnul Aqibah selaku guru mata pelajaran Akidah Akhlak yang menyatakan bahwa banyak guru yang merasa terbebani dengan hal-hal administratif seperti penyusunan RPP yang rumit sehingga mengganggu pelaksanaan pembelajaran itu sendiri. Oleh karena itu, beliau berharap program Merdeka Belajar tentang penyederhanaan RPP dapat mengurangi beban guru yang bersifat administratif sehingga para guru dapat fokus untuk melaksanakan pembelajaran.¹¹

⁸ Miftakhudin, wawancara oleh penulis, 18 Januari, 2022, wawancara 2, transkrip.

⁹ Khusnul Aqibah, wawancara oleh penulis, 12 Januari 2022, wawancara 1, transkrip.

¹⁰ Miftakhudin, wawancara oleh penulis, 18 Januari, 2022, wawancara 2, transkrip.

¹¹ Khusnul Aqibah, wawancara oleh penulis, 12 Januari 2022, wawancara 1, transkrip.

Miftakhudin selaku guru mata pelajaran Akidah Akhlak juga memberikan pendapat yang sama mengenai program Merdeka Belajar tentang penyederhanaan format RPP bahwa format RPP yang lebih sederhana dapat memudahkan tugas dan fungsi para guru sehingga mereka akan lebih fokus dalam mengajar para siswa.¹²

e. Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi yang Lebih Fleksibel

Khusnul Aqibah selaku guru mata pelajaran Akidah Akhlak juga memberikan pernyataan yang serupa bahwa program PPDB zonasi memiliki kelebihan pada konsep dan kekurangan pada pelaksanaannya. Konsep PPDB zonasi adalah konsep yang baik karena membuat semua orang memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang terbaik. Namun, pada pelaksanaan PPDB zonasi dianggap dapat meniadakan sekolah-sekolah unggulan sehingga para calon peserta didik berprestasi tidak mendapat tempat yang tepat untuk mengembangkan potensinya.¹³

Hampir sama dengan pendapat di atas, Miftakhudin selaku guru mata pelajaran Akidah Akhlak berpendapat bahwa sistem PPDB zonasi lebih baik tidak diterapkan karena sekolah akan sulit untuk mempertahankan kualitas pendidikan. Hal ini karena tidak adanya sistem seleksi potensi bagi para calon peserta didik, sehingga kualitas SDM di suatu wilayah juga belum dapat diketahui baik atau tidaknya.¹⁴

2. Proses Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar di MAN 2 Kudus

Berdasarkan proses wawancara, observasi, dan dokumentasi yang telah dilakukan oleh peneliti pada tanggal 24 Desember 2021 sampai 24 Januari 2022, implementasi kebijakan Merdeka Belajar di MAN 2 Kudus belum berjalan sepenuhnya karena masih terdapat instrumen pendukung kebijakan yang masih dipersiapkan oleh pihak madrasah. Hal ini berdasarkan pada wawancara dengan para guru pengampu rumpun mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Wakil Kepala Bidang Kurikulum MAN 2 Kudus seperti berikut:

¹²Miftakhudin, wawancara oleh penulis, 18 Januari, 2022, wawancara 2, transkrip.

¹³ Khusnul Aqibah, wawancara oleh penulis, 12 Januari 2022, wawancara 1, transkrip.

¹⁴Miftakhudin, wawancara oleh penulis, 18 Januari, 2022, wawancara 2, transkrip.

a. Proses Komunikasi Kebijakan Merdeka Belajar di MAN 2 Kudus

Informasi terkait kebijakan Merdeka Belajar diketahui oleh para guru melalui pemberitahuan Wakil Kepala Bidang Kurikulum secara singkat dan melalui media sosial pribadi para guru. Hal ini sesuai dengan wawancara dengan para guru mata pelajaran Akidah Akhlak dan Wakil Kepala Bidang Kurikulum MAN 2 Kudus.

Pernyataan yang hampir sama juga diberikan oleh Khusnul Aqibah selaku guru mata pelajaran Akidah yaitu beliau mengetahui informasi tentang Merdeka Belajar juga melalui media sosial pribadinya. Menurut beliau, informasi tentang Merdeka Belajar yang didapatkan memang masih sedikit karena mandrasah juga belum mengadakan sosialisasi tentang kebijakan tersebut kepada para guru dan siswa.¹⁵

Miftakhudin selaku guru mata pelajaran Akidah Akhlak juga menyatakan bahwa para guru biasanya menerima informasi Merdeka Belajar dengan cara sekilas mengkaji seminar-seminar di luar madrasah secara *online* melalui beberapa grup *WhatsApp* guru. Meski sudah berusaha mencari informasi tentang Merdeka Belajar secara mandiri, beliau beranggapan bahwa informasi tentang Merdeka Belajar masih secara umum dan memang belum jelas.¹⁶

Hal tersebut dibenarkan oleh M. Azhar Latif selaku Wakil Kepala Bidang Kurikulum yang memberi pernyataan bahwa informasi tentang Merdeka Belajar sudah disampaikan kepada para guru namun hanya sekilas melalui grup *WhatsApp* guru. Untuk sosialisasi Merdeka Belajar secara formal melalui seminar guru atau semacamnya memang belum diadakan di MAN 2 Kudus dan masih dalam perencanaan.¹⁷

b. Sumber Daya Kebijakan Merdeka Belajar di MAN 2 Kudus

Sumber daya dari proses implementasi kebijakan Merdeka di MAN 2 Kudus terdiri dari manusia yaitu sumber daya manusia dan fasilitas pendukung. Hal ini sesuai dengan

¹⁵ Khusnul Aqibah, wawancara oleh penulis, 12 Januari 2022, wawancara 1, transkrip.

¹⁶ Miftakhudin, wawancara oleh penulis, 18 Januari, 2022, wawancara 2, transkrip.

¹⁷ M. Azhar Latif, wawancara oleh penulis, 20 Januari, 2022, wawancara 3, transkrip.

wawancara dengan para guru mata pelajaran Akidah Akhlak dan Wakil Kepala Bidang Kurikulum MAN 2 Kudus yaitu:

Pernyataan yang hampir sama juga disampaikan oleh Khusnul Aqibah selaku guru mata pelajaran Akidah Akhlak yang menyatakan sebelum Merdeka Belajar diterapkan, konsep seperti itu telah digunakan oleh MAN 2 Kudus jadi beliau pribadi tidak memerlukan persiapan khusus. Namun, beliau tetap mempelajari mengenai konsep-konsep baru dalam Merdeka Belajar yang akan diterapkan pada pembelajaran. Beliau juga beranggapan bahwa MAN 2 Kudus telah menyediakan bagi para guru beberapa fasilitas penunjang kebijakan Merdeka Belajar yang kondisinya baik.¹⁸

Miftakhudin selaku guru mata pelajaran Akidah Akhlak juga memberikan pernyataan yang sama yaitu persiapan yang dilakukan oleh guru sebagai salah satu pelaksana kebijakan Merdeka Belajar adalah belajar tentang konsep atau inti dari kebijakan itu sendiri. Beliau juga menyatakan bahwa para guru juga telah diberikan beberapa fasilitas untuk menunjang tugasnya sebagai pelaksana kebijakan Merdeka Belajar. Perangkat komputer menjadi fasilitas yang paling sering digunakan oleh para guru dalam pembelajaran. Beliau menambahkan bahwa para guru nantinya akan diberikan fasilitas pengembangan kemampuan melalui seminar atau pelatihan yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan.¹⁹

Beberapa pernyataan tersebut dibenarkan oleh Azhar Latif selaku Wakabid Kurikulum yang menyatakan bahwa persiapan guru sebagai sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan Merdeka Belajar di MAN 2 Kudus masih diserahkan kepada masing-masing guru. Hal ini dikarenakan pihak MAN 2 Kudus sendiri masih dalam proses pengkajian tentang berbagai instrumen pendukung kebijakan Merdeka Belajar. Terkait fasilitas pendukung di MAN 2 Kudus telah tersedia untuk kemajuan pembelajaran sesuai dengan kebijakan Merdeka Belajar yang menginginkan kenyamanan dari para guru dan siswa sehingga menjadi

¹⁸ Khusnul Aqibah, wawancara oleh penulis, 12 Januari 2022, wawancara 1, transkrip.

¹⁹ Miftakhudin, wawancara oleh penulis, 18 Januari, 2022, wawancara 2, transkrip.

inovatif. Beberapa fasilitas tersebut yaitu adanya LDC di setiap kelas, adanya ruang komputer, bahkan telah tersedia gedung khusus untuk laboratorium sains berstandar nasional.²⁰

c. Disposisi Kebijakan Merdeka Belajar di MAN 2 Kudus

Diketahui disposisi atau sikap pelaksana kebijakan Merdeka Belajar di MAN 2 Kudus yaitu bertanggung jawab atas tugas dan wewenang yang telah diamanatkan. Para guru pengampu rumpun mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dalam implementasi kebijakan Merdeka Belajar memiliki tugas untuk melaksanakan tugas mengajar para siswa dan memiliki wewenang untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran yang telah dilakukannya dengan penuh tanggung jawab. Hal ini sesuai wawancara dengan para guru mata pelajaran Akidah Akhlak dan Wakil Kepala Bidang Kurikulum MAN 2 Kudus, yaitu:

Pernyataan yang serupa juga diberikan oleh Khusnul Aqibah selaku guru mata pelajaran Akidah Akhlak yang menyatakan bahwa beliau sebagai guru dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar memiliki tugas untuk menjadikan para siswa cerdas, terampil dalam teknologi, dan berakhlak mulia seperti visi yang dimiliki oleh MAN 2 Kudus. Beliau juga menambahkan bahwa sebagai guru beliau memiliki wewenang untuk mengajar dan mengevaluasi proses pembelajaran para siswa. Sama seperti pendapat Is'adur Rofiq, beliau juga beranggapan bahwa sikap tanggung jawab memang harus dimiliki oleh seorang guru.²¹

Miftakhudin selaku guru mata pelajaran Akidah Akhlak juga memiliki pendapat yang hampir sama yaitu tugas utama beliau sebagai guru dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar adalah mengajar para siswa. Sedangkan wewenang beliau adalah membuat rancangan pembelajaran hingga menilai potensi-potensi dari para siswa. Sikap tanggung jawab dianggap oleh Miftakhudin sebagai sikap yang harus diterapkan guru dalam menjalankan tugas, artinya

²⁰ M. Azhar Latif, wawancara oleh penulis, 20 Januari, 2022, wawancara 3, transkrip.

²¹ Khusnul Aqibah, wawancara oleh penulis, 12 Januari 2022, wawancara 1, transkrip.

seorang guru harus taat dan tunduk pada suatu kebijakan yang berlaku.²²

Pernyataan dari M. Azhar Latif selaku Wakabid Kurikulum juga sama seperti pernyataan beberapa guru pengampu mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, yaitu guru memiliki tugas untuk merencanakan, melaksanakan, dan melakukan penilaian pada pembelajara yang dilakukan, baik dan segi administrasi maupun praktiknya. Beliau menyatakan bahwa sikap yang diinginkan ada pada diri para guru saat melaksanakan kebijakan Merdeka Belajar yaitu tanggung jawab terhadap tugas dan melaksanakannya dengan sepenuh hati.²³

d. Struktur Birokrasi Kebijakan Merdeka Belajar di MAN 2 Kudus

Berdasarkan proses dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti, mekanisme kebijakan yang berupa *Standard Operating Procedure* (SOP) pembagian tugas guru mengajar di MAN 2 Kudus dalam pelaksanaan Merdeka Belajar adalah sebagai berikut:

Proses diawali dengan Wakabid Kurikulum menerima disposisi dari Kepala Madrasah untuk disusun menjadi pembagian tugas mengajar dalam satu semester lalu didistribusikan kepada seluruh guru pengajar dalam waktu satu minggu. Setelah para guru pengajar menerima pembagian tugas, mereka kemudian akan menyusun Silabus, Promes, dan RPP untuk digunakan sebagai bahan ajar kepada siswa. Proses tersebut membutuhkan waktu sekitar satu bulan. Setelah melakukan pembelajaran, pada semester terakhir para guru akan membuat rapor siswa yang diselesaikan dalam waktu tiga hari. Proses dilanjutkan dengan rekapitulasi dalam leger nilai oleh wali kelas yang kemudian diserahkan kepada bagian kesiswaan untuk diarsipkan dalam waktu sekitar tujuh hari. Tahap terakhir yaitu evaluasi yang dilakukan oleh Kepala Madrasah kepada seluruh alur SOP di atas dan siberikannya arsip nilai kepada para guru.²⁴

²²Miftakhudin, wawancara oleh penulis, 18 Januari, 2022, wawancara 2, transkrip.

²³ M. Azhar Latif, wawancara oleh penulis, 20 Januari, 2022, wawancara 3, transkrip.

²⁴ Dikutip dari SOP Pembagian Tugas Mengajar Guru MAN 2 Kudus.

3. Implikasi Kebijakan Merdeka Belajar pada Mata Pelajaran Akidah Akhlak Islam di MAN 2 Kudus

Berikut ini adalah hasil penelitian terkait implikasi kebijakan Merdeka Belajar pada mata pelajaran Akidah Akhlak di MAN 2 Kudus:

Khusnul Aqibah selaku guru mata pelajaran Akidah Akhlak, menyatakan bahwa saat beliau melaksanakan kebijakan Merdeka Belajar dalam pembelajaran Akidah Akhlak yang paling ditekankan adalah budaya literasi. Beliau selalu memberikan tugas yang bervariasi agar siswa tidak bosan dengan tugas yang monoton. Salah satu tugas yang sering diberikan kepada siswa yaitu membaca materi Akidah Akhlak di berbagai rujukan selain buku paket dan LKS yang disediakan oleh madrasah. Setelah itu siswa akan diugaskan untuk merangkum materi yang telah ia baca. Menurut Khusnul Aqibah, metode ini beliau terapkan karena prihatin dengan minat baca para siswa yang rendah apalagi setelah adanya pandemi.²⁵

Begitu pula dengan Miftakhudin selaku guru mata pelajaran Akidah Akhlak yang mengatakan bahwa keaktifan siswa tergantung pada metode yang digunakan oleh guru masing-masing. Jika metode yang digunakan itu menarik dan terdapat unsur komunikasi dua arah antara guru dan siswa maka otomatis siswa akan aktif. Dalam kebijakan Merdeka Belajar sendiri memang cenderung harus siswa yang aktif sedangkan guru hanya sebagai pembimbing mereka untuk belajar. Namun, dalam rumpun mata pelajaran Pendidikan Agama Islam seperti Akidah Akhlak memang terdapat beberapa materi yang sulit dipahami siswa jika tidak dengan penjelasan dari guru, maka metode ceramah pasti akan digunakan.²⁶

Beberapa siswa MAN 2 Kudus juga memberikan pernyataan tentang implikasi kebijakan Merdeka Belajar pada rumpun mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di MAN 2 Kudus. Ilham Firmansyah menyatakan bahwa metode yang menurutnya menarik seperti diskusi membuat dirinya aktif dalam pembelajaran. Selain itu, ia menganggap rumpun mata pelajaran Pendidikan Agama Islam adalah pelajaran yang lumayan mudah dikuasai dengan membaca materinya secara

²⁵ Khusnul Aqibah, wawancara oleh penulis, 12 Januari 2022, wawancara 1, transkrip.

²⁶ Miftakhudin, wawancara oleh penulis, 18 Januari, 2022, wawancara 2, transkrip.

mandiri, namun ia tetap menyukai metode ceramah karena menurutnya akan lebih memahamkan lagi.²⁷

Dilanjutkan dengan pernyataan Dwi Fimalinda selaku siswa yang menyatakan bahwa rumpun mata pelajaran Pendidikan Agama Islam merupakan pelajaran yang mudah dipelajari secara mandiri, namun untuk beberapa materi pada Fikih ia membutuhkan penjelasan lebih lengkap dari guru agar dapat memahaminya. Ceramah menjadi metode yang paling ia sukai dalam pembelajaran rumpun mata pelajaran Pendidikan Agama Islam karena ia memiliki gaya belajar dengan mendengarkan. Meskipun demikian ia tetap berusaha aktif untuk bertanya dan memberi tanggapan saat pembelajaran berlangsung. Menurutnya, dengan mempelajari rumpun mata pelajaran Pendidikan Agama Islam ia dapat meningkatkan keimanan kepada Allah dan memperbaiki sikapnya agar menjadi anak yang berbakti kepada orang tua.²⁸

Hal yang serupa juga dikatakan oleh Aura Nilam Amalia selaku siswa yang menyatakan bahwa dengan mempelajari rumpun mata pelajaran Pendidikan Agama Islam ia dapat mengambil banyak hikmah dari materi-materi yang diberikan oleh guru sehingga kepribadian yang ia miliki akan semakin baik. Menurutnya, rumpun mata pelajaran Pendidikan Agama Islam termasuk pelajaran yang mudah baginya sehingga ia dapat aktif bertanya dan memberi tanggapan saat pelajaran karena dengan membaca sendiri materi pelajaran dari buku ia dapat memahaminya.²⁹

C. Analisis Hasil Penelitian

1. Analisis Persepsi Guru tentang Konsep Kebijakan Merdeka Belajar pada Mata Pelajaran Akidah Akhlak di MAN 2 Kudus

Merdeka Belajar merupakan sebuah kebijakan baru dalam bidang pendidikan di Indonesia yang ditetapkan oleh Nadiem Anwar Makarim selaku Mendibudristek periode 2019-2024. Kebijakan ini muncul karena sistem pendidikan Indonesia yang dianggap terlalu membebani guru dan siswa. Banyak tugas

²⁷ Ilham Firmansyah, wawancara oleh penulis, 19 Januari, 2022, wawancara 4, transkrip

²⁸ Dwi Fimalinda Rizki Aljannah, wawancara oleh penulis, 18 Januari, 2022, wawancara 5, transkrip.

²⁹ Aura Nilam Amalia, wawancara oleh penulis, 18 Januari, 2022, wawancara 6, transkrip

administrasi yang mengekang para guru sehingga tugas utamanya yaitu mendidik para siswa untuk membentuk masa depan bangsa mulai tergeser. Selain itu pembelajaran yang cenderung hanya menuntut siswa untuk menghafal materi dan sistem penilaian yang cenderung berorientasi pada angka hasil ujian semata menjadikan potensi para siswa tidak berkembang. Padatnya kurikulum juga membatasi siswa untuk berkolaborasi, berkarya, dan belajar melalui lingkungannya.³⁰ Oleh karena itu munculah Merdeka Belajar sebagai solusi yang ditawarkan oleh Mendikbudristek Nadiem Makarim untuk mengatasi masalah-masalah tersebut.

Kebijakan Merdeka Belajar memberikan wewenang dan kebebasan pada lembaga pendidikan serta guru untuk terbebas dari birokratisasi yang rumit. Selain itu, siswa juga diberi kesempatan untuk menentukan bidang dan gaya belajar yang sesuai dengan kemampuannya. Tujuan dari kebijakan Merdeka Belajar yaitu memperbaiki kualitas pendidikan Indonesia dengan meningkatkan hasil belajar siswa, angka partisipasi dan distribusi pendidikan. Untuk mencapai tujuan tersebut, Mendikbudristek Nadiem Makarim meluncurkan empat pokok kebijakan Merdeka Belajar sebagai episode awal. Empat pokok kebijakan Merdeka Belajar tersebut terdiri dari penggantian UN dengan AKM dan survei karakter, penggantian USBN dengan asesmen mandiri dari sekolah, penyederhanaan format RPP, dan sistem PPDB zonasi yang difleksibelkan.³¹ Di sisi lain, Merdeka Belajar sebagai kebijakan pendidikan baru juga menimbulkan berbagai persepsi dari para pelaku pendidikan seperti guru.

Persepsi merupakan tanggapan langsung atau proses yang dilakukan oleh seseorang untuk mengetahui berbagai hal melalui pancaindranya.³² Menurut Rakhmat, persepsi merupakan pengalaman mengenai peristiwa, objek, dan hubungan-hubungan yang diterima dengan menyimpulkan informasi serta mengartikan pesan yang berupa rangsangan indra.³³ Menurut Orgel dan Mozkowitz, persepsi adalah suatu proses dalam diri individu yang

³⁰ Pengelola Web Kemendikbud, "Pidato Mendikbud pada Upacara Bendera Peringatan Hari Guru Nasional Tahun 2019," Kemendikbud, 22 November 2019, <https://kemendikbud.go.id>.

³¹ Rizal Maula, dkk., Merdeka Belajar Episode 1-10, iii.

³² Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, diakses pada 29 November, 2021, <https://kbbi.kemdikbud.go.id>.

³³ Hadi Suprpto Arifin, dkk., "Analisis Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Mahasiswa Untirta terhadap Keenaran Perda Syariah di Kota Serang," 90-91.

terintegrasi dalam menerima stimulus. Stimulus diindra lalu diorganisasikan dan diinterpretasikan sehingga menjadi sesuatu yang berarti.³⁴ Persepsi juga sering disebut sebagai anggapan, gambaran atau pandangan yang akan mempengaruhi sikap dan perilaku seseorang terhadap sesuatu. Tindakan seseorang dapat menjadi refleksi dari persepsi yang dimilikinya. Persepsi dari individu satu dengan individu yang lain dapat berbeda meskipun objek yang dipersepsi sama.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari kebutuhan psikologi, harapan, kepribadian, pengalaman, penilaian, dan kondisi alat indra. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari keadaan dan situasi lingkungan, sifat atau penampakan luar dari stimulus serta intensitas stimulus. Menurut Walgito yang dikutip oleh Rofiq, faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang setidaknya terdiri dari alat indra, syaraf dan pusat susunan syaraf, perhatian, dan objek yang dipersepsi.³⁵ Persepsi terdiri dari beberapa tahapan yaitu stimulus diterima oleh indra manusia kemudian seleksi dan diorganisasikan untuk mengambil keputusan. Setelah melewati semua tahapan tersebut kemudian persepsi akan terbentuk.³⁶

Dalam ajaran agama Islam telah dijelaskan bahwa Allah memberi manusia kemampuan untuk memersepsi melalui indra dan akal nya. Kemampuan memersepsi ini dapat menjadikan manusia sebagai makhluk Allah yang istimewa dari yang lain. Manusia dapat mengambil keputusan setelah berpikir untuk membedakan sesuatu yang baik dan buruk. Pendengaran menjadi indra pertama yang diberikan oleh Allah kepada manusia sejak dalam kandungan. Sedangkan penglihatan merupakan kemampuan utama manusia yang menjadi salah satu pintu gerbang masuknya stimulus untuk dipersepsi. Hal tersebut telah dijelaskan Allah dalam beberapa ayat Alquran, salah satunya yaitu QS. An-Nahl ayat 78 yang berbunyi:

³⁴ Adnan Achiruddin Saleh, *Pengantar Psikologi*, 80.

³⁵ Rofiq Faudy Akbar, "Analisis Persepsi Pelajar Tingkat Menengah pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus," 195.

³⁶ Andi Thahir, *Psikologi Belajar*, 27-29.

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ
وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (78)

Artinya: “Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur.” (QS. an-Nahl [16]: 78)³⁷

Dalam kaitan pembahasan persepsi guru terhadap konsep dan implementasi kebijakan Merdeka Belajar pada pelajaran Akidah Akhlak di MAN 2 Kudus, persepsi guru memiliki nilai penting dalam proses implementasi sebuah kebijakan. Hal ini karena guru menjadi salah satu ujung tombak pelaksanaan implementasi kebijakan pendidikan di suatu lembaga. Persepsi guru terhadap suatu kebijakan pendidikan merupakan gambaran umum tentang keinginan dan penilaian terhadap produk atau manfaat yang dihasilkan dari pelaksanaan kebijakan pendidikan. Merdeka Belajar sebagai sebuah kebijakan pendidikan tidak terlepas dari sasaran, tujuan, dan manfaat yang dibutuhkan oleh para guru dalam membantu tugas mereka. Meskipun terkadang persepsi yang muncul tidak sama dengan kenyataan yang terjadi, tetapi dengan mengetahui persepsi guru, setidaknya dapat memberi arah petunjuk untuk perbaikan sebuah kebijakan pendidikan.

Para guru pengampu mata pelajaran Akidah Akhlak di MAN 2 Kudus diketahui memiliki persepsi yang hampir sama mengenai konsep Merdeka Belajar. Persepsi-persepsi tersebut yaitu:

a. Persepsi terhadap Konsep Merdeka Belajar secara Umum

Secara umum, konsep Merdeka Belajar dianggap sebagai suatu kebijakan pendidikan yang bertujuan untuk memperbaiki sistem pendidikan Indonesia dengan memberi kebebasan kepada guru dan siswa untuk melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya namun tetap perpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Pancasila. Dengan

³⁷ Alquran, an-Nahl ayat 78, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019 Juz 11—20*, 384.

adanya Merdeka Belajar diharapkan guru dan siswa dapat nyaman sehingga dapat aktif berpartisipasi dan berinovasi dalam pembelajaran.

b. Persepsi terhadap Konsep Merdeka Belajar dalam Pendidikan Agama Islam

Merdeka Belajar disamakan dengan konsep pendidikan sepanjang hayat (*long life education*) atau menuntut ilmu dari buaian hingga liang lahat (*Minal Mahdi Ilal Lahdi*). Menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap Muslim baik laki-laki maupun perempuan. Pendidikan sepanjang hayat tidak hanya terpaku pada pendidikan formal seperti sekolah namun berlangsung secara terpadu dan terus-menerus dari masa kanak-kanak, remaja, dewasa, hingga lansia.

Tujuan dari pendidikan sepanjang hayat yaitu membangun manusia yang memiliki wawasan luas dan berbudi pekerti, bertanggungjawab kepada Tuhan, negara, serta masyarakat. Dalam pendidikan sepanjang hayat, seseorang dapat belajar apa saja, dari siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Bahkan setiap cobaan atau ujian hidup yang dialami oleh diri sendiri atau orang lain pun dapat menjadi pelajaran yang sangat berharga. Oleh karena itu dalam pendidikan sepanjang hayat tidak terdapat tuntutan bagi seseorang untuk menguasai ilmu di semua bidang tetapi ia diberikan kesempatan untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya secara maksimal. Hal ini karena Allah selalu memberikan cobaan atau ujian kepada manusia berdasarkan kemampuannya, seperti yang termuat dalam QS. al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ
رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِكْرَامًا
كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ
وَأَعْفُ عَنَّا وَاعْفُرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

Artinya: “Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya. Baginya ada sesuatu (pahala) dari (kebajikan) yang diusahakannya dan terhadapnya ada (pula) sesuatu (siksa) atas

(kejahatan) yang diperbuatnya. (Mereka berdo'a,) "Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami salah. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebani kepada orang-orang sebelum kami. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkau pelindung kami. Maka, tolonglah kami dalam menghadapi kaum kafir." (QS. al-Baqarah [2]: 286.³⁸

Dalam konsep Merdeka Belajar yang disamakan dengan pendidikan sepanjang hayat (*long life education*) pendidikan dipandang sebagai sesuatu yang sangat penting bagi setiap Muslim karena sebagai manusia yang mengalami dinamika perubahan secara terus menerus di sepanjang hidupnya, maka dibutuhkan adanya pengalaman hidup dan pengetahuan yang didapatkan dari pendidikan. Pendidikan juga dianggap memiliki peran penting dalam usaha menyiapkan dan mengembangkan kemajuan suatu bangsa karena kualitas generasi penerus bangsa dihasilkan dari pendidikan yang berkualitas pula.³⁹ Oleh karena itu Merdeka Belajar dipandang baik sebagai salah satu usaha pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia melalui perbaikan dan peningkatan potensi sumber daya manusia.

c. Persepsi terhadap Empat Pokok Merdeka Belajar

Para guru pengampu mata pelajaran Akidah Akhlak di MAN 2 Kudus juga memberikan pendapatnya mengenai empat pokok kebijakan Merdeka Belajar. Mereka memberikan tanggapan positif terhadap tiga dari empat pokok Merdeka Belajar yaitu penggantian UN dengan AKM dan survei karakter, penggantian USBN dengan asesmen mandiri dari sekolah, dan penyederhanaan format RPP. Sedangkan tanggapan tidak setuju atau negatif diberikan

³⁸ Alquran, al-Baqarah ayat 286, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019 Juz 1--10*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 65.

³⁹ Sulthon, *Ilmu Pendidikan* (Kudus: Nora Media Enterprise, 2011), 206-207.

terhadap program PPDB zonasi yang lebih fleksibel. Berikut adalah penjabaran dari persepsi guru pengampu rumpun mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di MAN 2 Kudus terhadap empat pokok kebijakan Merdeka Belajar:

- 1) UN merupakan alat ukur berstandar yang dikelularkan langsung oleh pemerintah untuk mengevaluasi keberhasilan sistem pendidikan nasional secara terpusat. Namun sayangnya pelaksanaan UN hanya dilaksanakan untuk beberapa mata pelajaran umum seperti Bahasa Indonesia dan Matematika, tidak dapat memberikan informasi yang menyeluruh tentang kemajuan potensi siswa sebelum dan sesudah mengikuti pendidikan serta tidak dapat menilai atau mengukur kemampuan kognitif serta karakter siswa.⁴⁰ Para guru pengampu mata pelajaran Akidah Akhlak di MAN 2 Kudus juga berpendapat bahwa pelaksanaan UN masih menjadi polemik di kalangan pelaku pendidikan dan cenderung membuat para siswa terbebani. Oleh karena itu mereka memandang program penggantian UN dengan AKM dan survei karakter secara positif. AKM dan survei karakter diharapkan dapat menjadi sistem penilaian yang lebih komperhensif bagi potensi siswa. Apalagi karakter atau akhlak dianggap penting untuk dimiliki bagi siswa madrasah. Keilmuan yang tinggi tanpa adanya akhlak mulia tidak akan berarti. Namun, para guru pengampu mata pelajaran Akidah Akhlak merasa program ini masih membingungkan karena Mendikbudristek tidak memberikan pilihan atau contoh format AKM dan indikator survei karakter yang matang untuk digunakan oleh mereka. Oleh karena itu mereka memberikan saran kepada pemerintah, khususnya Kemendikbudristek agar lebih mata dalam mempersiapkan instrumen pendukung program ini sebelum benar-benar disahkan.
- 2) Sama seperti pelaksanaan UN, USBN dianggap membuat para siswa merasa tertekan dan seakan tidak mendapat kemerdekaan dalam belajar karena format soal-soal pilihan ganda yang tidak dapat mengetahui hasil capaian belajar siswa. Oleh karena itu program

⁴⁰ Gefri Hidayat dan Revian Body, "Persepsi Guru-guru SMKN 5 Padang tentang Penghapusan Ujian Nasional (UN)," 363.

penggantian USBN dengan asesmen mandiri dari sekolah juga didukung oleh para guru pengampu mata pelajaran Akidah Akhlak. Para guru menganggap ketika asesmen diserahkan pada sekolah atau guru pengampu masing-masing Mapel akan memudahkan mereka menyusun dan menentukan bentuk asesmen untuk menilai kemampuan siswa secara lebih holistik. Hal ini karena guru menjadi pihak yang lebih mengetahui tingkat penguasaan siswa terhadap materi yang telah diajarkannya. Selain itu, siswa juga akan lebih mudah dalam mengerjakan asesmen mandiri tersebut karena telah disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki.

- 3) Pada kebijakan sebelumnya format RPP memiliki terlalu banyak komponen yang berat dan padat bagi guru untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, program penyederhanaan format RPP merupakan salah satu program yang paling didukung oleh para guru pengampu mata pelajaran Akidah Akhlak di MAN 2 Kudus. Adanya menyederhanaan format RPP yang cukup dengan satu halaman dan terdiri dari komponen tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, serta penilaian pembelajaran dianggap akan membuat tugas dan fungsi mereka sebagai perencana, pelaksanaan, dan penilaian kegiatan pembelajaran lebih efektif dan efisien. Selain itu, para guru dibebaskan dalam menyusun format RPP yang akan digunakan dalam pembelajaran. Hal tersebut karena tugas-tugas administratif yang harus dikerjakan oleh guru dapat berkurang sehingga mereka akan lebih fokus pada tugas mengajar dan mengevaluasi pembelajaran yang dilaksanakannya.
- 4) Sistem PPDB zonasi merupakan satu-satunya program Merdeka Belajar yang tidak didukung oleh para guru pengampu mata pelajaran Akidah Akhlak di MAN 2 Kudus. Mereka berpendapat bahwa meski PPDB zonasi memiliki tujuan yang baik untuk mewujudkan pemerataan pendidikan Indonesia. Dalam sistem zonasi, pemerintah daerah yang dapat menentukan proporsi final serta menetapkan zonasi wilayah. Sehingga madrasah-madrasah unggulan dapat menjadi tiada. Padahal madrasah unggulan adalah madrasah yang dikembangkan untuk menghasilkan lulusan yang unggul dengan

sistem PPDB yang diseleksi secara ketat, lingkungan pendidikan yang mendukung, fasilitas yang lengkap, kurikulum yang terpercaya, proses pembelajaran yang dapat dipertanggungjawabkan, waktu belajar yang lebih panjang, dan guru serta tenaga kependidikan yang terpilih.⁴¹ Hal tersebut membuat para guru mata pelajaran Akidah Akhlak di MAN 2 Kudus masih ragu akan kualitas SDM calon peserta didik di wilayah zonasinya karena tidak adanya proses seleksi masuk. Pelaksanaan PPDB zonasi dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan baru jika diterapkan di MAN 2 Kudus. Permasalahan yang dimaksud yaitu kualitas MAN 2 Kudus yang telah terbentuk sebagai madrasah unggulan akan sulit dipertahankan. Oleh karena itu, mereka menyarankan agar PPDB zonasi lebih baik tidak diterapkan.

Dari pemaparan beberapa persepsi guru pengampu mata pelajaran Akidah Akhlak di MAN 2 Kudus di atas menghasilkan perilaku yang mendukung pelaksanaan program penggantian UN dengan AKM dan survei karakter, penggantian USBN dengan asesmen mandiri dari madrasah, dan penyederhanaan format RPP. Meskipun memang belum sepenuhnya diterapkan tetapi para guru telah melakukan usaha pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar tersebut. Sedangkan program PPDB zonasi memang tidak diterapkan di MAN 2 Kudus karena para guru tidak mendukung pelaksanaan program tersebut.

2. Analisis Proses Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar di MAN 2 Kudus

Implementasi adalah suatu proses yang dilakukan oleh pemerintah ataupun swasta dengan mengikutsertakan manusia, kemampuan organisasional, dan dana untuk meraih tujuan yang telah ditentukan. Implementasi kebijakan Pendidikan merupakan proses pelaksanaan keputusan-keputusan melalui penyediaan dan pelaksanaan sarana pendidikan untuk menciptakan dampak atau tindakan dari individu maupun kelompok yang diarahkan agar mencapai tujuan pendidikan.⁴² Menurut Grindle, implementasi

⁴¹ Syafril dan Zelhendri Zen, *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan* (Depok: Kencana: 2017), 212.

⁴² Abdal, *Kebijakan Publik: Memahami Konsep Kebijakan Publik* (Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Sunan Gunung Djati, 2015), 116.

kebijakan bukan hanya dibatasi oleh mekanisme penjelasan keputusan politis dalam sebuah prosedur melalui jalur birokrasi, akan tetapi berhubungan juga dengan masalah siapa yang memperoleh apa dari sebuah kebijakan, bahkan implementasi kebijakan adalah sesuatu yang amat penting daripada pembuatan kebijakan itu sendiri.⁴³ Menurut Geoge Edward III, dalam implementasi kebijakan terdapat beberapa faktor yang saling berhubungan secara dinamis. Faktor-faktor tersebut adalah komunikasi, sumber, disposisi, dan struktur birokrasi.⁴⁴ Berikut adalah penjabaran proses implementasi kebijakan Merdeka Belajar di MAN 2 Kudus:

a. Penyampaian Informasi Merdeka Belajar di MAN 2 Kudus

Proses implementasi kebijakan Merdeka Belajar di MAN 2 Kudus diawali dengan penyampaian informasi tentang kebijakan tersebut. Penyampaian informasi ini dilakukan oleh M. Azhar Latif selaku Wakabid Kurikulum MAN 2 Kudus kepada para guru secara singkat. Informasi Merdeka Belajar di sampaikan melalui grup *WhatsApp* guru. Para guru juga mendapatkan informasi tentang Merdeka Belajar melalui media sosial masing-masing. Sayangnya informasi Merdeka Belajar tidak disampaikan secara lebih jelas dan konsisten. Hal ini karena memang pihak madrasah menyatakan masih mengkaji bagaimana Merdeka Belajar akan diterapkan di MAN 2 Kudus.

b. Sumber Daya Implementasi Merdeka Belajar di MAN 2 Kudus

Sumber daya dalam implementasi Merdeka Belajar di MAN 2 Kudus terdiri dari guru dan fasilitas pendukung. Wakabid Kurikulum memberikan kesempatan bagi para guru untuk menyiapkan dirinya dalam implemetasi Merdeka Belajar. Mereka juga diberikan fasilitas berupa modul sederhana mengenai Merdeka Belajar serta beberapa sarana prasarana yang ada di madrasah. Prasarana umum yang disediakan untuk mendukung kebijakan Merdeka Belajar khususnya pada proses pembelajaran diantaranya adalah jaringan internet, jaringan telekomunikasi, transportasi, CCTV, air, drainase, sanitasi, taman dan listrik. Sedangkan

⁴³ Ahmad Rusdiana, *Kebijakan Pendidikan dari Filosofi ke Implementasi*, 132.

⁴⁴ A. Rusdiana, *Kebijakan Pendidikan*, 125-128.

prasarana bangunan yang diberikan madrasah kepada guru dan siswanya yaitu gedung untuk keperluan ruang belajar, ruang pimpinan, ruang kantor, ruang guru, ruang rapat, ruang multimedia, laboratorium, perpustakaan, masjid, fasilitas umum dan kesejahteraan serta prasarana seni dan olah raga. Selain itu di madrasah juga disediakan LCD, komputer, *printer*, papan tulis dan spidol untuk menunjang pembelajaran. Semua fasilitas tersebut diberikan kepada gur dan siswa agar mereka dapat nyaman saat melakukan proses pendidikan di madrasah.

Untuk rencana di masa depan, MAN 2 Kudus akan meningkatkan fasilitas pendukung kebijakan Merdeka Belajar dengan memberikan pelatihan kepada para guru mengenai peningkatan kemampuan di berbagai bidang. Kegiatan tersebut direncanakan untuk meningkatkan kemampuan para guru MAN 2 Kudus baik dari segi akademik dan non-akademik.

c. Disposisi dalam Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar di MAN 2 Kudus

Kecenderungan sikap dan karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting dalam menciptakan implementasi kebijakan pendidikan yang berhasil mencapai tujuannya. Karakter yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan pendidikan yaitu komitmen yang tinggi dan kejujuran. Kedua karakter ini akan membuat pelaksana kebijakan pendidikan tetap menjalankan tugas, fungsi, dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kebijakan pendidikan.⁴⁵

Tanggung jawab menjadi sikap pelaksana kebijakan yang dinilai menjadi kunci sukses implementasi suatu kebijakan pendidikan. E. Mulyasa menjabarkan bahwa guru memiliki beberapa tanggung jawab yaitu⁴⁶:

- 1) Tanggung jawab moral. Para guru diharuskan untuk menghayati dan menerapkan perilaku yang sesuai dengan moral Pancasila dalam kehidupan kesehariannya. Tanggung jawab ini berhubungan dengan fungsi guru sebagai pendidik yaitu bertugas memberikan keteladanan dan mengembangkan karakter positif dari peserta didik. Dalam Merdeka Belajar, aspek afektif atau

⁴⁵ A. Rusdiana, *Kebijakan Pendidikan*, 125-128.

⁴⁶ Sulthon, *Ilmu Pendidikan*, 11.

karakter siswa menjadi salah satu aspek penilaian untuk mengganti UN. Para guru pengampu mata pelajaran Akidah Akhlak MAN 2 Kudus selalu membiasakan para siswa untuk mengembangkan sikap positif dalam pembelajaran dengan berbagai cara, misalnya menggunakan metode presentasi untuk melatih siswa agar berani mengungkapkan pendapat dan menghargai pendapat orang lain.

- 2) Tanggung jawab dalam bidang pendidikan. Para guru diharuskan dapat menerapkan berbagai metode pembelajaran, mengembangkan silabus, membuat RPP yang efektif dan efisien untuk diterapkan. Selain itu para guru juga bertanggungjawab untuk melakukan evaluasi hasil belajar siswa. Dalam pelaksanaan Merdeka Belajar di MAN 2 Kudus, tanggung jawab guru dalam bidang pendidikan ini dilaksanakan dengan memberikan pilihan metode pembelajaran bagi siswa. Selain itu para guru pengampu mata pelajaran Akidah Akhlak juga telah dibebaskan untuk membuat RPP yang ringkas sehingga mereka merasa dimudahkan. Evakuasi belajar yang dilakukan oleh para guru pengampu mata pelajaran Akidah Akhlak di MAN 2 Kudus dilakukan dengan memberikan berbagai pilihan asesmen bagi para siswanya. Dengan adanya pilihan tersebut siswa juga akan mudah untuk menyelesaikan asesmen sesuai keinginannya dan kemampuannya.
- 3) Tanggung jawab dalam bidang kemasyarakatan. Untuk tanggung jawab ini dalam pelaksanaan Merdeka Belajar di Man 2 Kudus memang belum ada karena empat pokok kebijakan Merdeka Belajar terdiri dari program-program yang fokus pada sistem pendidikan di lembaga.
- 4) Tanggung jawab dalam bidang keilmuan. Para guru juga harus ikut dalam memajukan keilmuan khususnya yang menjadi spesifikasinya. Dalam pelaksanaan Merdeka Belajar di MAN 2 Kudus, tanggung jawab ini dilaksanakan dengan adanya muatan lokal yaitu riset. Para guru akan menjadi pembimbing siswa dalam melakukan sebuah riset sosial yang berhubungan dengan Pendidikan Agama Islam untuk memperkaya wawasan keilmuan baik siswa dan guru. MAN 2 Kudus juga memiliki rencana memberikan seminar atau pendidikan

dasar secara rutin terkait berbagai keilmuan untuk mengembangkan kemampuan para guru.

d. Struktur Birokrasi dan SOP Pembagian Tugas Guru dalam Implementasi Merdeka Belajar di MAN 2 Kudus

Struktur birokrasi merupakan faktor yang menimbulkan dampak yang berarti terhadap pelaksanaan kebijakan pendidikan. Struktur organisasi dalam implementasi kebijakan pendidikan terdiri dari mekanisme dan struktur birokrasi. Mekanisme kebijakan atau biasanya berbentuk SOP digunakan sebagai petunjuk agar sesuai dengan sasaran dan tujuan dari kebijakan. Struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan pendidikan sebaiknya dibuat ringkas agar tidak melemahkan pengawasan dan tidak membuat prosedur birokrasi semakin rumit.⁴⁷ Hal ini juga diterapkan di MAN 2 Kudus, sistem birokrasi dan SOP pembagian tugas guru telah dibuat secara ringkas sehingga mudah dipahami oleh para pelaksana kebijakan khususnya guru. SOP yang ringkas tersebut juga memudahkan proses pelaksanaan hingga evaluasi yang dilakukan oleh Kepala Madrasah sebagai evaluator.

Berdasarkan KMA Nomor 168 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Agama, MAN 2 Kudus telah menyusun struktur birokrasi dan SOP pembagian tugas guru dalam implementasi kebijakan Merdeka Belajar sebagai berikut:

Proses diawali dengan Wakabid Kurikulum menerima disposisi dari Kepala Madrasah untuk disusun menjadi pembagian tugas mengajar dalam satu semester lalu didistribusikan kepada seluruh guru pengajar dalam waktu satu minggu. Setelah para guru pengajar menerima pembagian tugas, mereka kemudian akan menyusun Silabus, Promes, dan RPP untuk digunakan sebagai bahan ajar kepada siswa. Proses tersebut membutuhkan waktu sekitar satu bulan. Setelah melakukan pembelajaran, pada semester terakhir para guru akan membuat rapor siswa yang diselesaikan dalam waktu tiga hari. Proses dilanjutkan dengan rekapitulasi dalam lembar nilai oleh wali kelas yang kemudian diserahkan kepada bagian kesiswaan untuk diarsipkan dalam

⁴⁷ A. Rusdiana, *Kebijakan Pendidikan*, 125-128.

waktu sekitar tujuh hari. Tahap terakhir yaitu evaluasi yang dilakukan oleh Kepala Madrasah kepada seluruh alur SOP di atas dan siberikannya arsip nilai kepada para guru.

Dalam SOP pembagian tugas guru memuat waktu yang dibutuhkan dan hasil yang diharapkan dalam setiap tahapan pelaksanaan kebijakan. Hal tersebut dapat memiliki dampak yang baik bagi pelaksanaan sebuah kebijakan karena dapat mengefektifkan hasil dan mengefisienkan waktu yang ada.

Berdasarkan penjelasan tentang proses implementasi program-program Merdeka Belajar belum sepenuhnya di terapkan MAN 2 Kudus. Penyederhanaan format RPP menjadi program yang telah dilaksanakan oleh para guru di MAN 2 Kudus, namun program penggantian UN dengan AKM dan survei karakter serta penggantian USBN dengan asesmen mandiri dari sekolah belum diterapkan secara resmi karena masih dalam proses persiapan. Sedangkan program PPDB zonasi memang tidak diterapkan di MAN 2 Kudus.

3. Analisis Implikasi Kebijakan Merdeka Belajar pada Pembelajaran Mata Pelajaran Akidah Akhlak di MAN 2 Kudus

Salah satu alasan utama kebijakan Merdeka Belajar dicanangkan oleh Mendikbudristek Nadiem Makarim adalah karena sistem pendidikan Indonesia yang terlalu banyak memberikan tekanan kepada guru dan siswa. Pembelajaran yang cenderung hanya melatih hafalan dan sistem penilaian yang hanya fokus pada nilai semata membuat siswa sulit mengembangkan potensinya. Hal ini berimbas pada budaya dan minat baca dari penduduk Indonesia yang rendah. Pada tahun 2012, indeks minat baca dari penduduk Indonesia hanya mencapai 0,001 yang berarti hanya ada satu dari seribu orang yang memiliki minat untuk membaca.⁴⁸

Menurut penelitian para tahun 2016 bertema “*World’s Most Literate Nations Ranked*” yang diadakan oleh *Cental Connecticut State University*, Indonesia dinyatakan sebagai negara dengan minat baca peringkat ke-60 dari 61 negara. Padahal sekitar 60 juta penduduknya telah memiliki gawai dan diperkirakan terdapat 100 juta penduduk yang aktif menggunakan ponsel pintar pada tahun 2018 menjadikan Indonesia sebagai negara terbesar ke-4 dunia

⁴⁸ Sarwiji Suwandi, *Pendidikan Literasi* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019), 54.

dalam hal penggunaan ponsel pintar. Namun sayangnya penduduk Indonesia lebih senang mengabdikan waktunya untuk bermain ponsel pintar mereka dari pada mencari atau membaca informasi yang bermanfaat. Solusi yang ditawarkan Kemkominfo pada kasus tersebut adalah membangun literasi media yaitu inisiasi proyek #KROSCHEK. Melalui proyek tersebut masyarakat dapat mengirim laporan atau menanyakan permasalahan kemungkinan berita palsu dari suatu situs Medsos.⁴⁹

Jika minat baca penduduk Indonesia masih rendah maka budaya untuk menulis juga rendah sehingga tujuan pendidikan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa akan sulit dicapai. Merdeka Belajar menjadi salah satu upaya mengatasi kurangnya minat baca penduduk Indonesia dengan menekankan pembelajaran yang berisi literasi, numerasi, dan karakter sehingga menghasilkan peserta didik yang mampu berinovasi. Dalam Pendidikan Agama Islam, literasi menjadi budaya yang penting. Hal ini dibuktikan dengan turunnya wahyu pertama yaitu QS. al-Alaq ayat 1-5 yang berisi perintah Allah kepada Nabi Muhammad untuk membaca. Peristiwa tersebut menandakan bahwa membaca merupakan hal yang penting bagi manusia khususnya kaum Muslim untuk mengembangkan keilmuannya sebagai bekal di dunia dan akhirat.

Dengan kemampuan literasi numerasi tersebut, diharapkan para siswa menjadi lebih aktif dan menghasilkan inovasi dalam pembelajaran sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Implikasi dari implementasi kebijakan Merdeka Belajar di MAN 2 Kudus pada pembelajaran mata pelajaran Akidah Akhlak yaitu:

a. Berkembangnya Budaya Literasi Numerasi

Dalam dunia pendidikan, literasi dapat dipahami sebagai seperangkat kemampuan serta keterampilan dalam mendapat informasi dan memahami ilmu pengetahuan. Literasi juga dapat diartikan sebagai serangkaian aktivitas membaca, berpikir, memahami, mengartikan, menguraikan, menganalisis, dan menyimpulkan sesuatu yang dipelajari dalam bentuk tulisan. Untuk itu, kemampuan dan keterampilan literasi para siswa harus selalu dilatih,

⁴⁹ Evita Devega, "Teknologi Masyarakat Indonesia: Malas Baca Tapi Cerewet di Medsos," Web Kominfo, 10 Oktober, 2017, <https://www.kominfo.go.id>.

dikembangkan, serta digunakan dalam proses pembelajaran.⁵⁰ Kompetensi literasi numerasi merupakan pengetahuan dan keterampilan untuk menggunakan beragam simbol dan angka yang berkaitan dengan matematika dasar sebagai jalan memecahkan masalah nyata pada keseharian siswa. Kompetensi literasi numerasi juga merupakan kemampuan dan keterampilan dalam menganalisis, menginterpretasi, memprediksi, dan mengambil keputusan melalui informasi yang disajikan dalam beragam bentuk seperti tabel, grafik, bagan, dan lainnya.

Rumpun mata pelajaran Pendidikan Agama Islam seperti Qur'an Hadis, Fikih, Akidah Akhlak, dan SKI sering dianggap oleh para siswa sebagai mata pelajaran *grade II* di bawah mata pelajaran umum seperti sains. Mereka beranggapan dengan membaca sendiri materi PAI yang ada dalam buku paket atau pun LKS akan mudah dikuasai. Meskipun demikian para guru pengampu rumpun mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di MAN 2 Kudus tetap berusaha mengambil hikmahnya. Mereka memanfaatkan anggapan para siswa tersebut untuk menumbuhkan budaya literasi dan numerasi pada pembelajarannya melalui berbagai cara.

Pembelajaran Akidah Akhlak memiliki tujuan untuk membentuk siswa yang memiliki hati nurani yang baik agar dapat menentukan sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk. Oleh karena itu Khusnul Aqibah selaku guru Akidah Akhlak menumbuhkan budaya literasi agar para siswa dapat mengembangkan potensi akal dan hati nurani mereka untuk menyikapi permasalahan di kehidupan keseharian. Budaya literasi dikembangkan dengan memberikan tugas untuk membaca berbagai referensi materi Akidah Akhlak di buku selain buku paket dan LKS yang diberikan oleh madrasah kepada siswa. Para siswa diperbolehkan membaca materi Akidah Akhlak dari sumber apa saja dan dalam bentuk apa saja asalkan masih memiliki hubungan dengan materi yang ditentukan. Mereka boleh membaca koran, kitab-kitab, bahkan novel Islami. Selain mendapat tugas untuk membaca materi di berbagai sumber, mereka juga mendapat tugas untuk meringkas apa yang telah dipahami dari materi yang

⁵⁰ Sarwiji Suwandi, *Pendidikan Literasi*, 20.

dibaca tersebut. Dengan penugasan tersebut diharapkan wawasan keilmuan para siswa juga akan semakin berkembang.

Miftakhudin selaku guru Akidah Akhlak menumbuhkan literasi dengan memberikan tugas membaca materi pembelajaran kepada siswa yang kemudian dipresentasikan atau dipraktikan di depan kelas. Cara ini membuat para siswa selalu mempersiapkan diri dengan bersungguh-sungguh untuk membaca dan memahami materi. Selain itu dengan cara ini, kemampuan mengemukakan pendapat akan semakin terasah dan melatih mereka memiliki sikap yang percaya diri untuk menghadapi permasalahan yang mungkin mereka akan hadapi di kesehariannya.

Usaha-usaha yang dilakukan oleh para guru pengampu rumpun mata pelajaran Pendidikan Agama Islam tersebut tidak hanya bertujuan untuk menumbuhkan budaya literasi numerasi siswa tetapi mereka juga melatih siswa memperbaiki karakter yang dimiliki agar belajar untuk mengetahui, belajar untuk melakukan, belajar untuk menjadi diri sendiri, dan belajar untuk hidup dalam kebersamaan.

b. Berkembangnya Budaya Riset Keagamaan

Dalam Merdeka Belajar, inovasi pada pembelajaran adalah kegiatan yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Inovasi dalam pendidikan yaitu aktivitas pembaharuan dalam bidang pendidikan yang dapat berupa ide, metode atau barang untuk mengatasi permasalahan dalam bidang pendidikan yang dapat dirasakan dan diterima oleh seseorang atau masyarakat.⁵¹ MAN 2 Kudus merupakan madrasah yang telah dikenal masyarakat dengan keunggulan inovasi muatan lokalnya yaitu riset sains, riset keagamaan, riset sosial humaniora, pengembangan bahasa asing, adanya program tahfidz, pengembangan teknologin informasi dan komunikasi serta pembiasaan praktik ibadah.⁵²

Berdasarkan penjelasan di atas, maka budaya riset keagamaan menjadi salah satu implikasi kebijakan Merdeka Belajar pada mata pelajaran Akidah Akhlak di MAN 2 Kudus

⁵¹ Syafaruddin, Asrul, dan Mesiono, *Inovasi Pendidikan* (Medan: Perdana Publishing 2012): 52.

⁵² Dikutip dari Rencana Strategis MAN 2 Kudus Tahun 2020-2024.

karena sebelumnya memang riset sains dan humaniora yang berkembang lebih dahulu. Budaya riset keagamaan ini dibentuk melalui muatan lokal riset. Para guru pengampun mata pelajaran Akidah Akhlak di MAN 2 Kudus akan ditugaskan menjadi pembimbing siswa dalam riset keagamaan. Para siswa dalam berkonsultasi terkait topik keagamaan yang ingin mereka teliti kepada guru pembimbing riset yang kemudian akan mengarahkan dan membimbing mereka menyelesaikan penelitian.

Pada pengembangan budaya riset keagamaan ini, MAN 2 Kudus menerapkan skema pembelajaran riset yang memiliki standar prinsip penelitian orisinal dan target produk penelitian. Standar prinsip penggalian ide penelitian orisinal mengharuskan siswa membuat riset yang terdiri dari tiga komponen inti yaitu 10% teori penelitian, 60% observasi, dan 30% analisis data. Sedangkan target produk penelitian yaitu siswa kelas X menyelesaikan proposal penelitian sesuai tema yang dipilih dan siswa XI menyelesaikan laporan atau hasil dari penelitian. Meskipun riset keagamaan menjadi riset yang berkembang terakhir di MAN 2 Kudus namun diharapkan dengan usaha pembiasaan dan pengembang dapat menyamai riset sains dan humaniora.

Untuk mengembangkan inovasi riset keagamaan di MAN 2 Kudus, terdapat beberapa tahapan implementasi yang dapat dilalui para guru pengampu rumpun mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, yaitu: (1) Memperhatikan (*care*) masalah yang akan diinovasi; (2) Menciptakan hubungan (*relate*) yang baik dan harmonis dengan para siswa; (3) Merumuskan (*examine*) masalah-masalah yang dihadapi; (4) Mencari dan meneliti (*acquire*) sumber yang berkaitan dengan masalah yang diinovasi; (5) Melakukan percobaan (*try*) untuk mencari solusi terbaik bagi permasalahan terkait; (6) Menerjemahkan dan mengembangkan solusi (*extend*) yang telah didapat; (7) Mengusakan pembangunan kapasitas (*renew*) untuk mengembangkan inovasi secara bertanggung jawab dan terus menerus.⁵³

⁵³ Syafaruddin, Asrul, dan Mesiono, *Inovasi Pendidikan*, 69.